

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Yang Maha Indah sengaja menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bagian dari romantika kehidupan. Supaya romantika kehidupan ini semakin indah dan agar hubungan laki-laki dan perempuan mampu menyuburkan ketentraman, cinta dan kasih sayang serta kedamaian maka Allah menetapkan suatu ikatan suci yaitu perkawinan.¹

Perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut secara langsung menyebutkan bahwa perkawinan itu ialah membentuk suatu ikatan batin antara suami dan isteri agar membangun keutuhan dalam rumah tangga dan saling melengkapi.

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dan sakral, selain untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, tentram dan penuh dengan kasih sayang, perkawinan juga mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah menentramkan jiwa, mewujudkan atau melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan melatih memikul tanggung

¹ Didik Abdullah, 2005, *Bila Hati Rindu Menikah*, Pro-U Media: Yogyakarta. Hal 23

jawab. Dengan melihat beberapa tujuan dari perkawinan tersebut banyak pasangan yang mendambakan sebuah keluarga yang sempurna dan tercapai apa yang menjadi tujuan dari ikatan perkawinan mereka, salah satunya adalah adanya keturunan ditengah-tengah mereka.²

Dari rumusan perkawinan tersebut diatas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya ikatan lahir atau ikatan batin saja akan tetapi kedua-duanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hokum antara seorang laki-laki dan wanita untuk hidup bersama-sama sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sedangkan perkawinan sebagai ikatan batin merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang laki-laki dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjalinnya ikatan lahir batin ini merupakan dasar dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal.³

Tuhan menciptakan keduanya dengan maksud untuk membuat sebuah keluarga sebagai pasangan suami isteri yang sakinah, mawadah, dan warahmah seperti dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 Tahun 1991) menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah.

² Ali Hasan, 1996, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hal 3

³ Riduan Syaharani, 1987, *Perkawinan dan Perceraian*, Media Sarana Putra: Jakarta. Hal 12

Selain itu tujuan pernikahan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.⁴

Namun realita saat ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak juga tantangan-tantangan yang dihadapi, sehingga bukan saja berbagai masalah yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berakibatnya tuntutan setiap pribadi dalam rumah tangga agar wajib untuk memenuhi kebutuhan semakin terasa jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan timbul sehingga dapat menjadikan kearah perceraian jika tidak ada penyelesaian yang bisa memberikan solusi bagi pasangan suami isteri.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁵

⁴ K.N Sofyan Hasan Warkam Sumitro, 1994, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya : Usaha Nasional, hal 113.

⁵ Soebekti SH. Prof, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XX1: PT Inter Massa, hal. 247

Sehubungan dengan apa yang telah dijelaskan diatas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai proses penyelesaian perkara perceraian di wilayah kota Surakarta, di mana akhir-akhir ini banyak sekali kasus perceraian dengan alasan tersebut yang seringkali merugikan pihak dari isteri karena tindakan dari suaminya. Pengajuan gugatan cerai dari isteri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ini di benarkan oleh Undang-undang perkawinan yaitu di atur dalam pasal 19 huruf (d) Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang pada dasarnya Undang-undang perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah perempuan atau isteri yang mayoritas memiliki fisik yang lemah di bandingkan dengan suaminya atau pria. Tetapi banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melaporkan nasibnya kepada yang berwenang, karena salah satu sebabnya adalah ketergantungan korban terhadap pelaku baik secara ekonomi maupun sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya di sebabkan oleh faktor tidak siapnya pasangan dalam menempuh kehidupan berumah tangga yang kemudian di salurkan ke dalam kehidupan rumah tangga, dan seringkali yang menjadi korban adalah dari pihak isteri dan anak-anaknya.⁶

Sejak di berlakukanya UU No. 1 tahun 1974 maka ketentuan tentang tata cara mengajukan cerai gugat bagi mereka yang beragama non muslim yang dilakukan di Pengadilan Negeri yang telah diatur dalam Undang-undang ini. Dimana ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

⁶ Noelle Nelson, 2006, "*Bagaimana Mengenali dan Merspon Sejak Dini Gejala Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, : Gramedia, hal : 6

Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman kepercayaannya tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan metode atau cara tentang apakah alasan-alasanya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami isteri, kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hukum sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami isteri.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menyusun skripsi ini dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan terhadap perkara perceraian di Pengadilan Negeri Surakarta?
3. Apa akibat hukum yang timbul setelah perkara perceraian diputus oleh Hakim?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian;

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian;
- c. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perkara perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah :

1. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama ilmu hukum dalam hal penyelesaian perkara perceraian.

2. Bagi Masyarakat

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat di bidang hukum serta dapat membantu masyarakat mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penulisan skripsi ini, maka penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum terutama hukum perdata yang menyangkut mengenai proses penyelesaian perkara perceraian.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian data adalah merupakan hal yang sangat penting, dimana diperlukan sebagai pembahasan permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Untuk menyelesaikan dan mendapatkan data serta jawaban yang obyektif ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dibutuhkan metode-metode tertentu, adapun pengertian metode penelitian adalah tak lain daripada ‘cara mencari (dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah)’.⁷

Adapun metode penelitian yang dipakai untuk membahas masalah tersebut adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pada metode penelitian hukum normatif ini, dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif ini meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum.⁸ Penulisan penelitian ini mengenai proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri Surakarta yang didasarkan suatu kajian aspek hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat agar tercipta suatu keteraturan hidup yang berdasarkan aturan hukum. Sehingga dapat diketahui kedudukan hukum terhadap proses penyelesaian perkara perceraian.

⁷ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 97.

⁸ Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju. Hal. 60.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu.⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maka dalam hal ini menggambarkan atau melukiskan mengenai Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Surakarta.

3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data sekunder

Dengan menggunakan bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer meliputi :

- a) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- c) Yurisprudensi

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku bacaan, laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu **Tinjauan**

⁹Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia. Hal. 57.

Yuridis Proses Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, website, dll.

b. Data primer

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari:

a) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta.

b) Subyek Penelitian

Yaitu sejumlah keterangan dari Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

F. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan hukum

baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara:

1) Observasi

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataan dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial manusia dan salah satu aspek.¹⁰

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.¹¹ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan memungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung

¹⁰ Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 30-31.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*, Semarang: Ghalia Indonesia, hal. 57.

jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

G. Metode Analisis Data

Karena penulisan ini menggunakan penulisan deskriptif maka metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh atau metode analisis. Di dalam penelitian ini literatur yang ada hubungannya dengan Proses Penyelesaian Perkara Perceraian dipadukan dengan pendapat responden (orang yang di wawancarai) di lapangan dan dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahanannya dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum terdiri atas 4 (empat) Bab yang disusun secara sistematis, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan hukum. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Rumusan masalah

- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Metode penelitian
- F. Metode pengumpulan data
- G. Metode analisis data
- H. Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Mengenai tentang Perceraian:
 - 1. Pengertian Perceraian
 - 2. Alasan-alasan Perceraian
 - 3. Tata Cara Penyelesaian Perkara Perceraian
 - 4. Pengadilan Yang Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara Perceraian
- B. Tinjauan Umum mengenai Pemeriksaan Perkara Perdata:
 - 1. Menyusun surat gugatan perceraian
 - 2. Mengajukan gugatan perceraian
 - 3. Pemanggilan Para Pihak
 - 4. Pemeriksaan Perkara Perceraian di Pengadilan
 - a. Usaha perdamaian
 - b. Pembacaan gugatan
 - c. Jawaban tergugat
 - d. Replik
 - e. Duplik
 - f. Pembuktian

- Pengertian Pembuktian
- Beban Pembuktian
- Alat Bukti
- Penilaian Pembuktian
- Kesimpulan Pembuktian

5. Putusan Hakim

- Pengertian Putusan
- Macam-macam Putusan
- Kekuatan Putusan hakim
- Pertimbangan Putusan Hakim

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses penyelesaian perkara perceraian
2. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan terhadap perkara perceraian
3. Akibat hukum yang timbul setelah perkara perceraian diputus oleh Hakim

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran